

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemekaran ini telah melalui tahapan-tahapan administratif dan partisipatif yang cukup panjang dan kompleks, dimulai dari sosialisasi peraturan perundang-undangan, musyawarah internal Badan Musyawarah (Bamus), pengusulan rencana pemekaran, pembentukan panitia pelaksana, hingga akhirnya ditetapkan Nagari Kamang Tengah Anam Suku sebagai nagari definitif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2022.
2. Pemekaran Nagari Kamang Tengah Anam Suku memberikan dampak positif terhadap pelayanan di Nagari, diantaranya adalah Peningkatan layanan, penyederhanaan prosedur, standar pelayanan yang jelas, Pengelolaan Sumber daya yang lebih terfokus, sementara itu sebagai Nagari Pemekaran yang sedang dalam proses Pembangunan yang bertahap, ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik menjadi persoalan yang dihadapi oleh Nagari Kamang Tengah Anam Suku.
3. Pemekaran Nagari Kamang Tengah Anam Suku merupakan perwujudan dari implementasi prinsip-prinsip dasar Siyash Syar'iyah dalam tata kelola pemerintahan lokal, yang menitikberatkan pada terciptanya kemaslahatan, keadilan, serta amanah dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Proses ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan akses layanan, efisiensi waktu, serta penyederhanaan prosedur

administratif. Pemerataan pelayanan menjadi lebih terasa karena cakupan wilayah yang lebih kecil, memungkinkan pelayanan publik menjangkau masyarakat secara lebih langsung dan merata. Aparatur pemerintahan nagari pun diarahkan untuk menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai amanah dan integritas, yang ditopang oleh sistem pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini tercermin dari upaya peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi layanan secara terbuka, penggunaan media digital sebagai sarana akuntabilitas publik, serta komitmen menjaga independensi layanan dari intervensi pihak luar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, pemerintah Nagari Kamang Tengah Anam Suku perlu terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pelayanan publik yang efisien dan transparan. Penguatan sistem informasi nagari, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, serta komitmen terhadap standar operasional yang jelas akan sangat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masyarakat pun diharapkan semakin aktif dalam mengambil peran, baik dalam proses perencanaan maupun pengawasan terhadap pelayanan publik, sebagai bentuk partisipasi yang sesuai dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.
- Abbas, Syahrizal. 2021. "Siyasah Syar'iyah dalam Pemerintahan Modern: Analisis Maqasid al-Shariah terhadap Kebijakan Publik." *Jurnal Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 2.
- abdullah fuady, Susantitria. 2022. "Perspektid Siyasah Sary 'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Pendahuluan Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak sepenuhnya mendapatkan tempat di hati rakyat , justeru terkadang hal tersebut dianggap sebagai hal yang bertolak belakang dengan." *el-dusturie* 1 (2): 74.
- Aisy, Rifdah Rohhadul. 2022. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah)," Kabupaten Lampung Tengah.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah pentasihan mushaf al-qur'an badan litbang dan diklat kementerian agama republik Indonesia.
- Andika, Rian. 2018. "Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Andriansa. 2022. "Analisi Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (COVID-19)."
- Anwar, Sutoro Eko dan Syaiful. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Jawa Barat: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
- Arifah, R. 2019. "Peran Pemerintahan Nagari dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemekaran Nagari." *Jurnal Pemerintahan Desa* 7:56-68.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*.
- Asmawani. 2014. "Konseptualisasi teori." *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* - 11 (9): 312.
- "BPS Kabupaten Agam." 2023a. Agam: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. 2023. <https://dukcapil.agamkab.go.id/up/download/02012023142725Buku-Agregat-2022-I.pdf>.
- . 2023b. "Kecamatan Kamang Magek Dalam Angka 2023."
- Budiman, Aditya Farhanuddin, Astri Setia, dan Diella Jauza. 2022. "Penerapan Etika Pelayanan Publik dalam mewujudkan Good Governance." *Jurnal Dialektika*:

- Jurnal Ilmu Sosial* 19 (1): 64–74.
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>.
- Dawud, Abu. 2025. "Sunnah.com." Sunnah.com. 2025.
<https://sunnah.com/abudawud:2608>.
- Duri, Ropiko, dan Mutia Rahmah. 2020. "Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3 (1): 43–52. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1378>.
- Efrianto, Efrianto. 2020. "Perubahan Sistem Pemerintahan Dan Kepemilikan Lahan Di Kota Padang: Studi Kasus Nagari Nanggalo 1978-2010." *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 6 (2): 248–69. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v6i2.198>.
- Efrinaldi. 2007. *Fikih Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Cetakan Pe. Granada Press.
- Engkus, Ainyana Azan, Alliadzar Hanif, dan Anisa Fitri. 2021. "Buku Mewujudkan GG melalui Pelayanan Publik." *Dialektika* 19 (1): 1–361.
- Fajarni, Suci. 2017. "Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah di Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama* 9 (1): 104. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06>.
- Fatimah, S, A Frinaldi, dan L Magriasti. 2023. "Dampak Pemekaran Nagari Kuranji Hulu Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging dalam Meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...* 8 (4). <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/28861><https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/viewFile/28861/13522>.
- Fauzi, A, I Fitriani, R Maulida, dan Sri Ningsih. 2024. "Penerapan Prinsip Good governance Dalam Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempurejo." ... *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 9 (2): 75–80.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/386><https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/386/358>.
- Firdausi, Novandina Izzatillah. 2020. "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan." *Kaos GL Dergisi* 8 (75): 147–54.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://>
- Firman, Hamdan, Wesley Liano, Aditya wardana, dan Dkk. 2020. *pelayanan publik di era tatanan normal baru*. bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Harahap, aisyah, Ferri Alfadri, dan Muhri Salam. 2023. "Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum dan Sesudah Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*

Desa 6:1–22.

Harahap, Solehuddin. 2022a. "Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam." *jurnal Hukum Islam* 5:112–27. <https://doi.org/1055403>.

———. 2022b. "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam." *Hukum Islam* 5 (2): 112–27.

Haris, Syamsuddin. 2015. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desain, Implementasi, dan Problema*. Jakarta: LIPI Press.

Hayati, Amal, Hamsah Hudafi, Sekar Diningrum, dan Vira Rangkuti. 2023. "Jurnal ilmu syariah" 19:1–25.

Herianti, Herianti. 2017. "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Aqidah-ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3 (2): 158–66. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v3i2.4533>.

Hidayat, Syarif. 2012. *Pemekaran Wilayah dan Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irwansyah, Setiawan, Zenal. 2023. "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah." *jurnal cerdas hukum* 2.

International Monetary Fund. 2010. "Governance Issue-Background Notes International Monetary Fund 5 Note I. Distinguishing Governance, Good Governance, And Corruption 1 A. Overview of Terms," 5–11.

Jasmine, Khanza. 2014. "Proses Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.

Kamilatin, Alia. 2022. "Penerapan Siyasah Syar'iyah Dalam Prinsip Kepemimpinan Modern (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) metro.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring." 2025. 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekar>.

Marta, Joan. 2012. "Faktor Pemicu dan Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah di Sumatra Barat." *Jurnal Ecosains* 1 (1): 61–76.

Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulia, Beni, Syafruddin Ritonga, Irwan Nasution, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, dan Universitas Medan Area. 2021. "Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat." *Jurnal*

- Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi* 3 (1): 18.
<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.509>.
- Oktavia, Nadila, dan Desmiwerita. 2024. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya." *Jurnal Riset Akunt* Oktavia, Nadila, dan Desmiwerita. 2024. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya." *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 1 (2): 74–82.
<https://doi.org/10.62194/dh7h5991.an> 1 (2): 74–82.
<https://doi.org/10.62194/dh7h5991>.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Salareh Aia Timur, Pemerintahan Nagari Salareh Aia Utara, Pemerintahan Nagari Salareh Aia Barat, Pemerintahan Nagari Sungai Cubadak, Pemerintahan Nagari Kot. 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/233210/perda-kab-agam-no-4-tahun-2022>.
- Putra, Firman. 2019. "Siyasah Syar'lyyah Menurut Syi'Ah Itsna 'Asyriyyah." *Jurnal EL-RIYASAH* 9 (1): 61. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6837>.
- Rahmat, Aulia, M Syamsudin, Fakultas Syari, Universitas Islam, Negeri Imam, Bonjol Padang, Profesor Emeritus, et al. 2023. "Eksistensi nagari di sumatera barat dalam hegemoni kebijakan negara *" 11 (2): 310–29.
- Riani, Ni Ketut. 2021. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik." *Pharmacognosy Magazine* 75 (17): 399–405.
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, dan Wismanto Wismanto. 2024. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 (1): 380–86.
<https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>.
- Sahadi, Erpan. 2021. *Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah. Pharmacognosy Magazine. Vol. 75.*
- Siallagan, dion, dan glosalia Siregar. 2023. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah Agar Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Baik (Good Government)." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 2 (2): 231–39.
<https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.391>.
- Sinaga, Saut Parlindungan, Marlon Sihombing, dan Agus Suriadi. 2021. "Implementasi Konsep Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Kecamatan Di Kota Pematangsiantar." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 8 (1): 48–56.
<https://doi.org/10.56015/governance.v8i1.33>.

- Suku, Kamang Tengah Anam. 2023. "Rencana pembangunan jangka menengah." sumatra barat. 2023.
- . 2025. "Kamang Tengah Anam Suku." 2025.
- Suryadi, A., & Susanto, B. 2019. "Pemekaran Wilayah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat: Studi Kasus tentang Peran Nagari dalam Pembangunan." *Jurnal Administrasi Pemerintahan* 6:45-58.
- Sutoro, Eko. 2015. *Membangun Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat*. jakarta timur: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, B. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Takwa. 2019. "Analisis Dampak Pemekaran Desa terhadap Pelayanan Publik di Desa Tanah Putih, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima[skripsi, dipublikasikan]." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
- Tapis, Jurnal, Teropong Aspirasi, dan Politik Islam. 2022. "492255-None-Aead833F" 18 (1): 15-26.
- Ummy Athahirah, Astika dan Rossy Lambelanova. 2019. "Kesiapan Pemekaran 'Kabupaten Renah Indojati' di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 21 (1): 60-63.
- Wahijul, Kadri, dan Nurul Tumadi. 2022. "Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah." *hukum tata negara* 5 (1): 55-65.
- Wahyuningsih, Diah, Zuly Qodir, dan Tengku Imam Syarifuddin. 2020. "Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat." *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (2): 64-83. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.7>.